

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN
DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN
DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai Derajat S1**

Program Studi Akuntansi



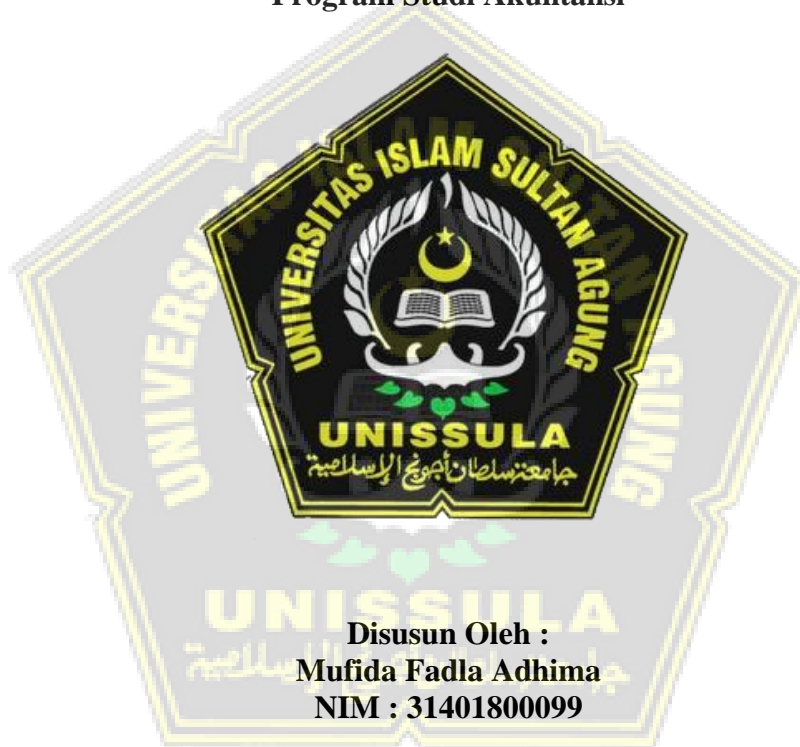
**Disusun Oleh :
Mufida Fadla Adhima
NIM : 31401800099**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN
DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN
DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai Derajat S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
Mufida Fadla Adhima
NIM : 31401800099**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN
LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* DENGAN DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disusun Oleh :
Mufida Fadla Adhima
Nim : 31401800099

Telah disetujui pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 19 Agustus 2022

Pembimbing

 Digitally signed by Maya
Indriastuti
DN: cn=Maya Indriastuti,
o=Universitas Sultan Agung
Semarang, ou=Fakultas Ekonomi,
email=maya@unissula.ac.id, c=ID
Date: 2022.08.19 17:29:03 +07'00'

Maya Indriastuti, S.E., MSi., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP

NIK. 211406021

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun Oleh:

Mufida Fadla Adhima

Nim : 31401800099

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 2 September 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

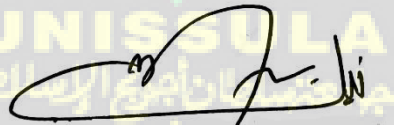
Penguji I



Maya Indriastuti, S.E., M.Si, Ak, CA, CSRS
NIK. 211406021

Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si, CSRS
NIK. 211415029

Penguji II



Naila Najihah, S.E., M.Sc
NIK. 211418029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 2 September 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE., M.Si., CSRS
NIK. 211415029

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mufida Fadla Adhima

NIM : 31401800099

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 September 2022



Mufida Fadla Adhima

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Berikut adalah yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mufida Fadla Adhima
NIM : 31401800099
Program Studi : SI Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang
Nomor HP/email : 082138951727/ mufidafadla@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul : **“ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – Ekklusif untuk disimpan, dialihkan/mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 13 September 2022



Mufida Fadla Adhima

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Berikut adalah yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mufida Fadla Adhima
NIM : 31401800099
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang
Nomor HP/email : 082138951727/ mufidafadla@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Fesis/Disertasi dengan judul : **“ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif untuk disimpan, dialihkan/mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Agung Semarang.

Semarang, 13 September 2022



Mufida

Mufida Fadla Adhima

PERSEMBAHAN DAN MOTO

Persembahan :

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Skripsi ini dipersembahkan untuk :

“Abi dan Ibuku tercinta yang tidak pernah lelah mendukung dan mencurahkan doanya untuk saya”

“Adik saya tersayang, Rada, yang selalu menemani dan mendengar keluh kesah saya”

“Keluarga besar yang telah memberikan motivasi pada saya”

“Sahabat – sahabat saya yang sabar dan setia memberi semangat”

“Serta teman – teman saya yang telah memberi dukungan dan do’a”

Moto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Al-Insyirah : 6)

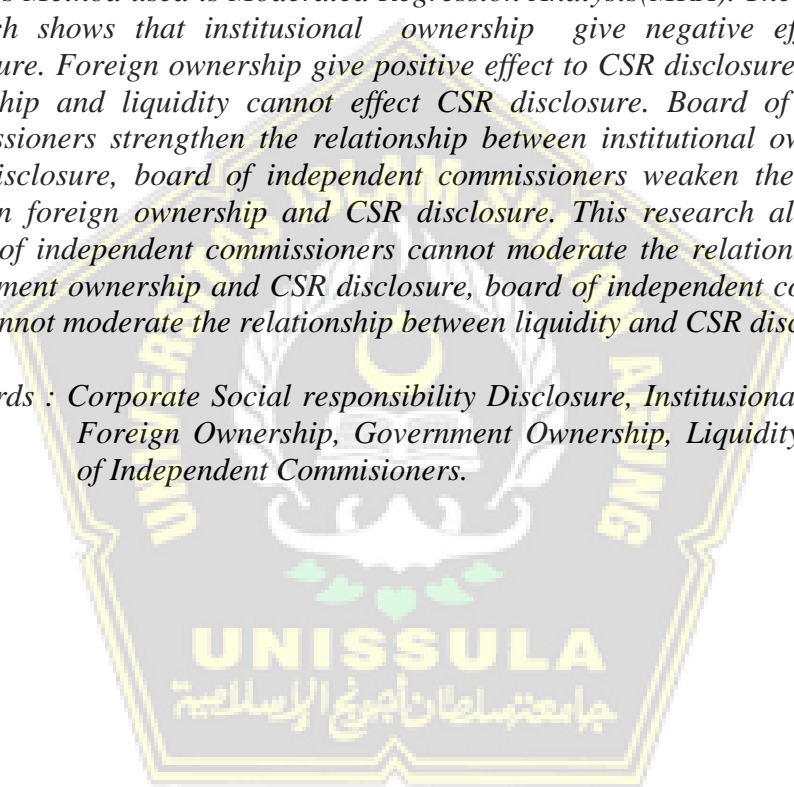
“*Allah is sufficient for us, and He is the best disposer of affairs for us*”

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu.” (Ali bin Abi Thalib)”

ABSTRACT

The aims of this research are to analyze and examine the effect of Institutional Ownership, Foreign Ownership, Government Ownership, and Liquidity towards Corporate Social Responsibility Disclosure with the moderation of Board of independent Commissioners. The population of this research is Manufactured Company listed on Indonesian Stock Exchange (IDX). The samples used are the amount of 35 Manufactured Company using the Secondary Data gotten from the Annual Report for three years (2017-2020) . The Analysis Method used is Moderated Regression Analysis(MRA). The result of this research shows that institutional ownership give negative effect to CSR disclosure. Foreign ownership give positive effect to CSR disclosure, government ownership and liquidity cannot effect CSR disclosure. Board of independent commissioners strengthen the relationship between institutional ownership and CSR disclosure, board of independent commissioners weaken the relationship between foreign ownership and CSR disclosure. This research also state that Board of independent commissioners cannot moderate the relationship between government ownership and CSR disclosure, board of independent commissioners also cannot moderate the relationship between liquidity and CSR disclosure.

Keywords : Corporate Social responsibility Disclosure, Institutional Ownership, Foreign Ownership, Government Ownership, Liquidity, and Board of Independent Commissioners.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, dan Likuiditas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan moderasi Dewan Komisaris Independen. Populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan sebanyak 35 Perusahaan Manufaktur dengan menggunakan Data penelitian berupa Data Sekunder yang diperoleh dari annual report yang dipublikasi selama empat tahun (2017-2020). Analisis yang digunakan yakni *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan pemerintah dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR, dewan komisaris independen memperlemah hubungan kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa Dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR.

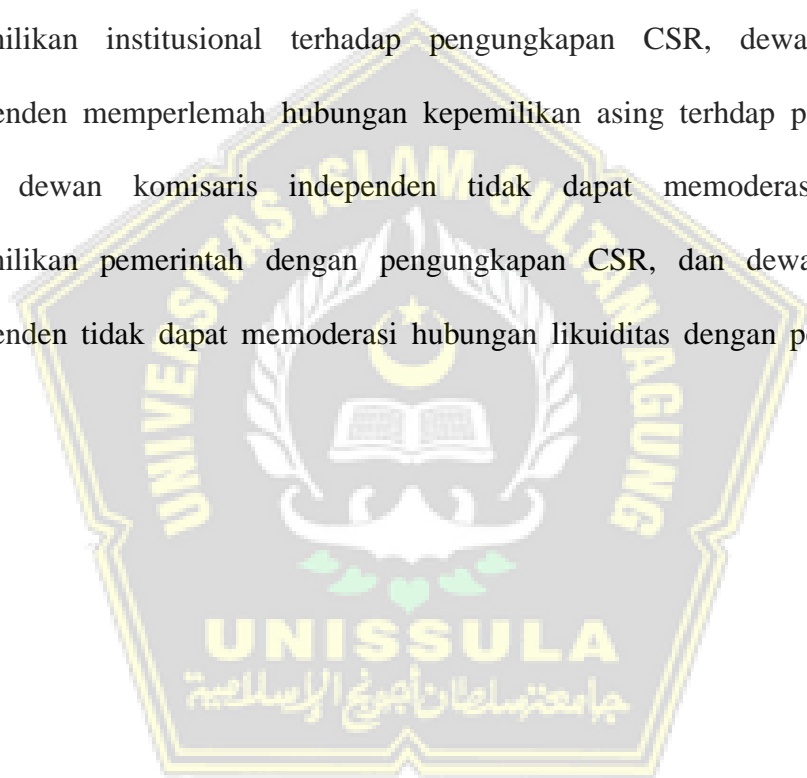
Kata Kunci : Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Likuiditas, dan Dewan Komisaris Independen.

INTISARI

Penelitian ini mengungkap tentang pengaruh Struktur Kepemilikan dan Likuiditas terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan moderasi Dewan Komisaris Independen. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari segala aktivitasnya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan dan kemudian diungkap dalam Laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan kajian teori secara mendalam dan kritis, terdapat delapan hipotesis yaitu : 1. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR, Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR, Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR, Likuiditas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR, Dewan Komisaris Independen dapat memperkuat hubungan Kepemilikan Institusional dengan Pengungkapan CSR, Dewan Komisaris Independen dapat memperkuat hubungan Kepemilikan Asing dengan Pengungkapan CSR, Dewan Komisaris Independen dapat memperkuat hubungan Kepemilikan Pemerintah dengan Pengungkapan CSR, Dewan Komisaris Independen dapat memperkuat hubungan Likuiditas dengan Pengungkapan CSR.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *annual report* perusahaan manufaktur di bidang industri barang konsumsi yang terdaftar di IDX dalam 4 tahun (tahun 2017 sampai 2020) sebanyak 35 perusahaan, sehingga diperoleh jumlah sampel 140 data. Pengujian dalam penelitian ini

menggunakan *Moderation Regression Analysis* (MRA) dengan SPSS. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR, dewan komisaris independen memperlemah hubungan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR, dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR, dan dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan likuiditas dengan pengungkapan CSR.



KATA PENGANTAR

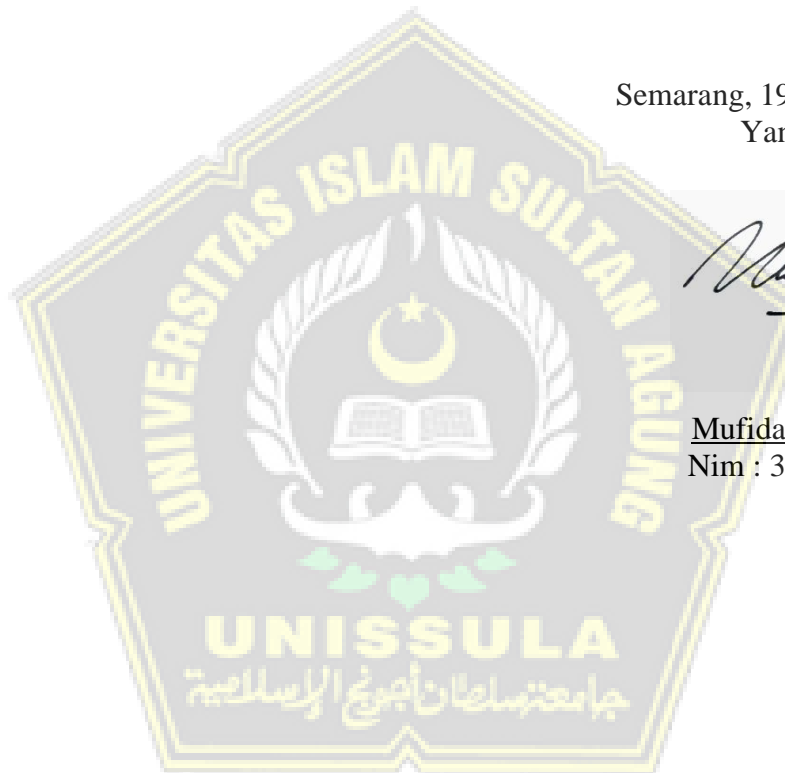
Puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat, Hidayah, dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si., CSRA., CSRA., CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Maya Indriastuti, SE., M.Si., Ak, CA, CSRS., CSRA., CSP selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Orang tua dan adik atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
6. Keluarga besar Universitas Islam Sultan Agung, khususnya teman-teman

seperjuangan atas dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

Semarang, 19 Agustus 2022
Yang Menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mufida Fadla Adhima', is placed over a light gray rectangular background.

Mufida Fadla Adhima
Nim : 31401800099

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
PERSEMBAHAN DAN MOTO	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
INTISARI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Agensi	8
2.1.2 Teori Stakeholder	9
2.2 Definisi Variabel	10
2.2.1 Kepemilikan Institusional	10
2.2.2 Kepemilikan Asing	10
2.2.3 Kepemilikan Pemerintah	11
2.2.4 Likuiditas	11
2.2.5 Dewan Komisaris Independen	12
2.2.6 Pengungkapan CSR	12
2.3 Penelitian Terdahulu	13

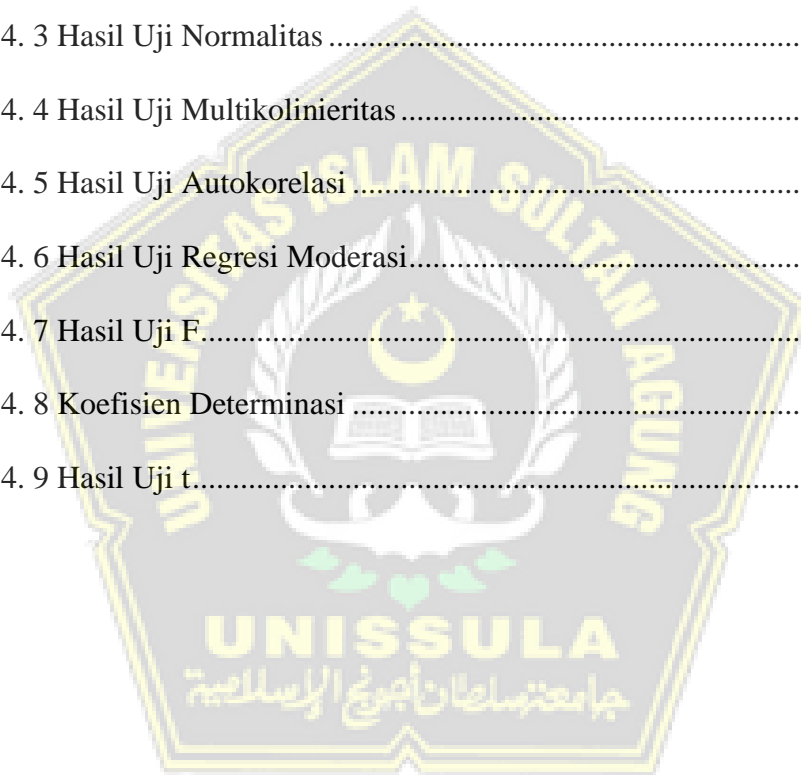
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis	17
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR	17
2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR	18
2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR	19
2.4.4 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR	20
2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen	21
2.4.6 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen	21
2.4.7 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen	22
2.4.8 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Populasi dan Sampel	26
3.3 Sumber dan Jenis Data	27
3.4 Metode Pengumpulan Data	27
3.5 Variabel dan Indikator	27
3.6 Teknik Analisis	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	31
4.1.1 Deskripsi Sampel	31
4.2 Analisis Data	32
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	32
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	34
4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi (MRA)	37
4.2.3.1 Hasil Uji Kelayakan Model	41
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	47
4.3.3 Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR	47
4.3.4 Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR	49
4.3.5 Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR	49
4.3.6 Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR	51
4.3.7 Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi	

Dewan Komisaris Independen.....	52
4.3.8 Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen	53
4.3.9 Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen	54
4.3.10 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen	55
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Implikasi.....	59
5.2.1 Implikasi Teoritis	60
5.2.2 Implikasi Praktis	60
5.3 Keterbatasan Penelitian	61
5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator	27
Tabel 4. 1 Teknik Purposive Sampling.....	31
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statsitik Deskriptif.....	32
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	34
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas	35
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	37
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Moderasi.....	38
Tabel 4. 7 Hasil Uji F.....	41
Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi	42
Tabel 4. 9 Hasil Uji t.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	25
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan.....	64
Lampiran 2. Tabulasi Data.....	65
Lampiran 3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	69
Lampiran 4. Hasil Regresi Moderasi	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu wujud pertanggungjawaban sebuah perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari segala aktivitasnya. CSR ini akan dimuat dalam sebuah pengungkapan yang disebut pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR merupakan penyampaian kegiatan CSR secara mendalam melalui laporan tahunan. Pengungkapan CSR tersebut menunjukkan responsibilitas dan transparansi sebuah perusahaan terhadap lingkungan (Rizky & Yuyetta, 2015). Saat ini, pengungkapan CSR menjadi topik yang dibicarakan oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat tetapi investor dan pemerintah. Hal ini karena perusahaan yang mampu melakukan pengungkapan CSR yang baik artinya perusahaan tersebut telah melakukan pertanggungjawaban untuk masyarakat sekitar serta lingkungan. Maka, hal ini bermakna bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada laba tetapi pada keberlangsungan lingkungan maupun perusahaan itu sendiri.

Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban bagi sebuah perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, kenyataannya saat ini tidak semua perusahaan melakukan dan mengungkapkan CSR dengan semestinya. Menurut Indonesia Environment & Energy Center menyebutkan bahwa implementasi CSR di Indonesia masih rendah. Belum semua perusahaan

melakukan dan mengungkapkannya secara baik dan benar. Terdapat sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menerapkan CSR, sedangkan bagi yang mampu melakukan CSR dengan baik akan memperoleh penghargaan seperti penghargaan TOP CSR Award, CSR Excellence Awards dan sebagainya. Contoh perusahaan tersebut adalah PT. Gudang Garam, PT. Darya-Varia, dan PT. H.M. Sampoerna. Penghargaan tersebut justru dapat menjadi keunggulan dan menarik perhatian masyarakat atau investor. Untuk memperbaiki pengungkapan CSR nya, perusahaan sejatinya hanya perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR seperti struktur kepemilikan, likuiditas, dan dewan komisaris independen.

Struktur kepemilikan adalah perbandingan jumlah pemilik saham yang ditimbulkan dari adanya perbedaan jenis kepemilikan saham. Sebuah perusahaan bisa dimiliki oleh seseorang secara personal (individu), institusi, pihak asing, ataupun pemerintah. Struktur kepemilikan ini merupakan bagian dari GCG. Struktur kepemilikan ini dibagi menjadi tiga yakni kepemilikan Institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Kepemilikan insitusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lainnya (Rivandi, 2021). Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional bergantung dari jumlah investasinya. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi akan akan menciptakan pengawasan yang lebih optimal. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional akan mendorong efisiensi kinerja perusahaan (Patrisia & I Nym, 2019).

Kepemilikan Asing yakni jumlah kepemilikan saham perusahaan oleh warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing (Edison, 2017). Pihak yang

berasal dari luar negeri berbeda dengan pihak dalam negeri, mereka merupakan pihak yang lebih concern pada kasus ketenagakerjaan, pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Selain itu, mereka lebih fokus pada peningkatan GCG atau kinerja perusahaan karena tidak mungkin terjun langsung secara detail terhadap kegiatan bisnis sehari-hari. Kepemilikan pemerintah merupakan Jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah. Sebagaimana aturan undang-undang, pemerintah akan cenderung untuk memberikan pengungkapan secara jelas mengenai pengungkapan CSR dimana sebagai bukti bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungannya (Zaid et al., 2020).

Sejalan dengan teori agensi struktur kepemilikan diyakini mampu mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan stakeholder, pemilik asing dengan manajemen, serta pemerintah dengan perusahaan (Zaid et al., 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat berbagai hasil. Kepemilikan institusional dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR (Zaid et al., 2020). Sedangkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR (Edison, 2017). Hasil yang berbeda pula, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR dan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Patrisia & I Nym, 2019). Lain hal nya, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR (Sari & Rani, 2015).

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka

pendeknya. Sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan baik dalam menyelesaikan hutangnya maka artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang kuat. Perusahaan tersebut akan menunjukkan pertanda bahwa mereka lebih baik dari perusahaan lain melalui kegiatan yang bersangkutan dengan tanggungjawab sosial yakni mengungkapkan informasi CSR secara luas dari perusahaan mereka (Sofwan, 2019).

Faktor selanjutnya terhadap pengungkapan CSR adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki relasi terhadap pihak di dalam perusahaan. Seperti dalam hal kepengurusan, keuangan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan orang-orang di dalam perusahaan. Fungsi pengawasan merupakan tugas atau fungsi dari dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan pihak luar perusahaan yang menjalankan fungsi control dari principal dan mengontrol sikap opportunistik manajemen. Dengan kata lain, dewan komisaris independen menjadi jembatan antara principal dan manajer (Sofwan, 2019). Berdasarkan fungsi pengawasan dari dewan komisaris independen tersebut maka dewan komisaris independen mampu memberikan pengawasan yang lebih baik sehingga memperkuat pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah, serta likuiditas terhadap pengungkapan CSR.

Ketidakkonsistenan mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR membuat topik ini perlu diteliti kembali. Penelitian ini menambahkan variabel independen berupa likuiditas Sofwan, (2019) karena

variabel tersebut diyakini mampu mempengaruhi pengungkapan CSR dan menggunakan variabel dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi karena penggunaan variabel moderasi berupa dewan komisaris independen masih jarang dilakukan yakni merujuk pada penelitian seperti yang dilakukan oleh (Zaid et al., 2020). Selain itu, objek berbeda digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan perusahaan manufaktur di bidang industri barang konsumsi karena diyakini perusahaan tersebut melakukan proses produksi yang berkaitan erat dengan CSR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang dikemukakan di atas ditemukan masalah, “masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR, selain itu penggunaan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi masih jarang digunakan”. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian pengaruh struktur kepemilikan dan likuiditas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan adanya moderasi dewan komisaris independen?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Terdapat perbedaan pendapat pada penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR serta dengan penambahan variabel likuiditas dan adanya moderasi dewan komisaris independen sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan opini-opini tersebut. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa

pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
5. Apakah kepemilikan institusional meningkat terhadap pengungkapan CSR dengan adanya dewan komisaris independen?
6. Apakah kepemilikan asing meningkat terhadap pengungkapan CSR dengan adanya dewan komisaris independen?
7. Apakah kepemilikan pemerintah meningkat terhadap pengungkapan CSR dengan adanya dewan komisaris independen?
8. Apakah likuiditas meningkat terhadap pengungkapan CSR dengan adanya dewan komisaris independen?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR.

4. Untuk mengetahui Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR.
5. Untuk mengetahui pengaruh moderasi Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, dan Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah disebutkan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana untuk memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan dalam perusahaan.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan investor sebagai wacana yang dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi atau teori keagenan menurut Jensen dan Meckling, (1976) adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan kerja antara principal (pemegang saham) dan agen (manajer). Principal sendiri adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan yang memberi tugas dan wewenang kepada agen (manajemen) untuk mengelola perusahaan. Teori keagenan ini memiliki keterkaitan dengan penyelesaian masalah yang muncul pada hubungan keagenan tersebut. Masalah yang pertama yakni prinsipal (pemegang saham) memiliki tujuan maupun keinginan yang bertentangan dengan agen (manajer). Masalah keagenan yang kedua yaitu berkaitan dengan pembagian risiko yang biasanya muncul ketika principal dan manajer mempunyai sikap atau keputusan yang berbeda terhadap sebuah pengambilan risiko. Maka konflik keagenan akan lebih besar apabila saham dipegang oleh lebih banyak dibanding dipegang oleh beberapa orang saja (Zaid et al., 2020).

Jensen dan Meckling, (1976) menggambarkan teori agensi sebagai teori struktur kepemilikan perusahaan. Teori keagenan ini menerangkan bagaimana konflik keagenan dapat sangat bergantung pada stuktur kepemilikan. Kepemilikan yang tersebar pada suatu perusahaan membuat masalah keagenan anantara manajemen puncak dan pemegang saham juga menyebar. Berbeda dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih besar dapat menyelesaikan konflik keagenan ini secara lebih efektif karena mereka memiliki kesempatan yang lebih

besar untuk terlibat dan memantau manajer bersama dengan dewan komisaris independen. Maka jelas bahwa taraf penyebaran kepemilikan dalam sebuah perusahaan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi pelaporan CSR. Berdasar hal tersebut dapat dilihat juga bahwa dewan komisaris independen akan mendorong perusahaan untuk lebih terlibat dalam kegiatan CSR dan pengungkapan CSR secara mendalam melalui pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (Zaid et al., 2020).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder menjelaskan stakeholder merupakan sekelompok ataupun individu yang mampu mempengaruhi maupun dipengaruhi tujuan organisasi. Pengungkapan CSR ini didorong oleh keberadaan stakeholder sebagai pemangku kepentingan yakni pihak yang berurusan secara langsung maupun tidak langsung pada aktivitas operasi perusahaan. Berdasar teori stakeholder informasi keuangan dan non keuangan sangat dibutuhkan oleh stakeholder untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Investor juga membutuhkan kedua jenis informasi tersebut untuk membuat keputusan investasi. Kinerja keuangan dapat dikukur dengan berbagai rasio salah satunya yakni Likuiditas. Sedangkan Informasi non keuangan dapat berupa laporan pengungkapan CSR. Rasio likuiditas yang tinggi pada suatu perusahaan akan menunjukkan kondisi keuangan yang sehat bagi suatu perusahaan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan tersebut untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya secara lebih mendalam (Sofwan, 2019).

2.2 Definisi Variabel

2.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh institusi (lembaga), misalnya perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, serta yang lainnya. Dalam menganalisis kinerja dan perilaku manajemen, pemegang saham institusional mempunyai peluang, kemampuan, dan keahlian yang tepat. Kepemilikan oleh pihak institusional yang tinggi akan menciptakan system pengawasan yang lebih optimal sehingga dapat mengurangi sikap opportunistik seorang manajer (Rivandi, 2021). Pengukuran kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.2.2 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah jumlah kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Baik warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing. Pihak asing (luar negeri) memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan sosial seperti pelanggaran HAM, tenaga kerja serta masalah lingkungan seperti penebangan liar, pemanasan global, pencemaran air, dan pencemaran udara. Hal tersebut memberi bukti bahwa Pihak asing tersebut cenderung memperhatikan segala aktivitas perusahaan termasuk di dalamnya aktivitas yang berkaitan dengan pengungkapan CSR. Perusahaan yang bekerjasama dengan investor asing dalam bentuk ownership ataupun trade akan lebih mendukung untuk melaksanakan pengungkapan CSR (Patrisia & I Nym,

2019). Pengukuran kepemilikan asing dirumuskan sebagai berikut :

$$KA = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.2.3 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah biasanya akan menjadi pusat perhatian masyarakat karena terdapat pertanggungjawaban atas dana pemerintahan di dalamnya. Masyarakat tentunya ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perusahaan tersebut terhadap aktivitas perusahaannya serta bagaimana alokasi dana yang dikelola perusahaan tersebut. Maka dari itu, Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah akan terdorong untuk memberikan pengungkapan CSR nya (Zaid et al., 2020). Pengukuran kepemilikan pemerintah dirumuskan sebagai berikut :

$$KP = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.2.4 Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo atau waktu penagihan. Likuiditas ini merupakan rasio yang dapat memberi gambaran seberapa tingkat kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga akan memicu perusahaan untuk memperhatikan seluruh aspek yang ada diperusahaan termasuk untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada masyarakat agar terbentuk pula citra atau image yang baik mengenai perusahaan tersebut (Sofwan, 2019). Perhitungan likuiditas menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2.2.5 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah salah satu dari beberapa pemegang fungsi pengawasan dalam perusahaan. Dewan Komisaris Independen merupakan pihak luar dari perusahaan dimana tugasnya adalah menjalankan fungsi control dari principal dan mengontrol sikap opportunistik manajemen. Dewan Komisaris Independen menjadi jembatan antara principal dan manajer (Sofwan, 2019). Pengukuran variabel moderasi ini menggunakan rasio dengan rumus :

$$\text{DKI} = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

2.2.6 Pengungkapan CSR

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah penyampaian informasi mengenai segala aktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan atas dampak yang timbul akibat aktivitas operasi perusahaan. Pengungkapan hal ini menjadi bukti bahwa perusahaan tidak hanya mencari laba tetapi bertanggungjawab atas lingkungan diperusahaanya berada (Edison, 2017). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat diukur dengan rumus berikut ini :

$$\text{CSR} = \frac{n}{k}$$

CSR = *Corporate Social Responsibility Disclosure*

n = Jumlah dari indikator GRI-G4 yang diungkapkan perusahaan

k = Jumlah maksimal item yang harus diungkapkan yakni sejumlah 91 item

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	(Zaid et al., 2020)	- Variabel bebas : Kepemilikan Institusional, kepemilikan Asing, dan Kepemilikan Pemerintah - Variabel Moderasi : Dewan Komisaris Independen - Variabel Terikat : Pengungkapan CSR	Ordinary Last Square (OLS), Fixed Effects (FE), dan Generalized Method of Moments (GMM)	1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 2. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 3. Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 4. Variabel Dewan Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan variabel kepemilikan Institusional,

				Kepemilikan Asing, dan Kepemilikan Pemerintah.
2	(Edison, 2017)	- Variabel bebas : Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial - Variabel terikat : Pengungkapan CSR	Analisis Regresi Berganda	Variabel Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
3	(Patrisia & I Nym, 2019)	- Variabel bebas : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing - Variabel terikat : Pengungkapan CSR	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
4	(Rivandi, 2021)	- Variabel bebas : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Publik - Variabel terikat : Pengungkapan	Analisis Regresi Panel	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. 2. Kepemilikan institusional

		CSR		berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 3. Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
5	(Sofwan, 2019)	- Variabel bebas : Manajemen Laba Riil, Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage - Variabel Moderasi : Dewan Komisaris Independen - Variabel Terikat : Pengungkapan CSR	Analisis Regresi Moderasi	1. Manajemen laba Riil, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 2. Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. 3. Dewan komisaris independen mampu memperkuat pengaruh positif manajemen laba riil dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR. 4. Dewan komisaris independen mampu memperlemah pengaruh negatif leverage terhadap pengungkapan CSR. 5. Dewan komisaris independen tidak dapat memperkuat

				pengaruh positif profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.
6	(Mudjiyanti & Maulani, 2017)	-Variabel bebas : Likuiditas dan Profitabilitas - Variabel terikat : Pengungkapan CSR	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR. 2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
7	(Purba & Candradewi, 2019)	-Variabel bebas : Leverage, Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan -Variabel terikat : Pengungkapan CSR	Analisis Regresi Linier Berganda	Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
8	(Kusumawati et al., 2018)	-Variabel bebas : Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing -Variabel terikat : Pengungkapan CSR	Analisis Data Kuantitatif	Kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR
9	(Sari & Rani, 2015)	-Variabel bebas : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Return On Assets (ROA) dan Ukuran	Analisis Regresi Linear Berganda	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Perusahaan -Variabel terikat : Pengungkapan CSR	2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. 3. ROA berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
--	---

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan Institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh institusi (lembaga). Keberadaan institusional tersebut mampu mengurangi perilaku oportunistik dari manajemen perusahaan sehingga sistem pelaporan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik (Rivandi, 2021). Jika sistem pelaporan perusahaan berjalan dengan baik maka tentunya pelaporan *corporate social responsibility* nya akan di perhatikan dengan baik pula.

Teori agensi menganggap struktur kepemilikan dapat mempengaruhi kondisi perusahaan dalam mengatasi konflik keagenan. Konflik tersebut adalah dimana principal dengan manajemen mempunyai keinginan dan pengambilan keputusan yang berbeda dalam bisnis. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang menyebar membuat konflik keagenan yang harus diatasi tersebut juga menyebar. Berbeda jika perusahaan dengan stuktur kepemilikan yang tidak

menyebarkan sehingga secara lebih efektif konflik keagenan dapat lebih mudah diselesaikan. Maka dari itu, melalui kepemilikan institusional yang tinggi pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan CSR menjadi lebih baik.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Patrisia & Nym, (2019) dan Ryani et al., (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebuah perusahaan. Berdasarkan teori yang ada maka Hipotesis yang dapat dibuat yakni :

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan asing adalah jumlah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak asing. Investor asing cenderung lebih memperhatikan mengenai masalah sosial dan lingkungan seperti kasus ketenagakerjaan, pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pihak asing akan memperhatikan segala aktivitas perusahaan termasuk di dalamnya aktivitas yang berkaitan dengan pengungkapan CSR. Jumlah kepemilikan asing yang besar di sebuah perusahaan akan memberi dampak positif terhadap pengungkapan CSR-nya (Patrisia & I Nym, 2019).

Teori agensi menjadi teori yang mendasari hal tersebut bahwa konflik keagenan dapat diselesaikan oleh struktur kepemilikan yang tepat. Konflik keagenan yang didalamnya termasuk permasalahan mengenai keputusan kegiatan CSR dan pelaporannya yang semula tidak lengkap akibat perbedaan keinginan antara manajemen dengan principal menjadi terorganisir. Keberadaan kepemilikan yang tidak menyebar akan mengurangi kesulitan dalam mengatasi

konflik tersebut sehingga kepemilikan asing yang tinggi membuat pengungkapan CSR menjadi tinggi pula.

Edison, (2017) dan Ryani Kusumawati et al., (2018) membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesisnya yakni :

H2 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan pemerintah merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah di suatu perusahaan. Perusahaan dengan pemerintah sebagai bagian dari pemiliknya akan menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat ingin tahu mengenai kegiatan serta pertanggungjawaban perusahaan secara penuh. Maka perusahaan tersebut lebih terdorong untuk memberi pengungkapan tanggungjawab sosial padalaporan perusahaan. Pemilik pemerintah tersebut akan ikut berupaya dalam mematuhi aturan mengenai kewajiban melakukan CSR kemudian mengungkapkan CSR nya secara lebih jelas. Hal itu menandakan adanya pengaruh positif dari kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan yang tepat menurut teori agensi dapat mendorong perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan antara manajemen dan principal sehingga pembuatan laporan perusahaan menjadi lengkap dan transparan. Kepemilikan dalam perusahaan yang tidak terlalu menyebar membuat penyelesaian masalahnya lebih mudah sehingga kepemilikan pemerintah yang besar dalam suatu perusahaan akan membuat pengungkapan CSR nya lebih

tinggi.

Penelitian Zaid et al., (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesisnya adalah :

H3 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.4.4 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo atau waktu penagihan. Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang baik artinya memiliki kondisi keuangan yang sehat. Kondisi tersebut membuat perusahaan memiliki dana yang cukup untuk mempertanggungjawabkan serta mengungkapkan tanggungjawab sosial sehingga likuiditas tersebut memberi dampak positif pada pengungkapan CSR.

Berdasarkan teori stakeholder, informasi keuangan dan non keuangan sangat dibutuhkan oleh stakeholder untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Investor juga membutuhkan kedua informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Kinerja keuangan dapat diukur dengan berbagai rasio salah satunya yakni likuiditas sedangkan Informasi non keuangan dapat berupa laporan pengungkapan CSR. Maka dari itu likuiditas mampu memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Likuiditas dapat mempengaruhi pengungkapan CSR (Sofwan, 2019) dan (Purba & Candradewi, 2019). Perusahaan yang mempunyai keuangan yang sehat dapat mengungkapkan *corporate social responsibility* secara mendalam. Berdasar hal tersebut hipotesis yang dapat dibuat yakni :

H4 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan pihak luar perusahaan yang menjalankan fungsi control dari principal dan mengontrol sikap opportunistik manajemen. Fungsi dan sikap tersebut mampu mempengaruhi struktur kepemilikan diperusahaan untuk mengungkapkan CSR perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, keberadaan komisaris independen mampu menetralsir konflik-konflik serta memberikan pertimbangan yang tepat mengenai pengungkapan atau pelaporan perusahaan di dalam rapatnya. Dari hal tersebut, komisaris independen mampu memberikan dorongan pada struktur kepemilikan di suatu perusahaan dalam hal ini adalah kepemilikan institusional sehingga diyakini dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR.

Hal itu seiring dengan penelitian dari Zaid et al., (2020) bahwa dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan institusional terhadap Pengungkapan CSR. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dibuat yakni :

H5 : Dewan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR

2.4.6 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen

Sama dengan keterkaitan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR serta dewan komisaris independen, kepemilikan asing

sebagai salah satu jenis struktur kepemilikan juga mendapat pengaruh yang sama dari dewan komisaris independen. Keberadaan dewan komisaris independen ini dapat memberikan dukungan di perusahaan untuk membuat pengungkapan CSR.

Teori agensi menganggap kehadiran komisaris independen dapat menjadi penengah dari konflik keagenan yakni diantara principal dan manajemen. Konflik perbedaan keinginan atau pendapat dalam membuat keputusan bisnis dan pelaporan tersebut dapat diatasi oleh keberadaan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen dapat memberikan masukan untuk membuat pengungkapan CSR dengan lebih baik dalam rapat sehingga dewan komisaris independen bersama dengan kepemilikan asing dapat memicu perbaikan dalam pembuatan pengungkapan CSR.

Penelitian Zaid et al., (2020) memberikan hasil bahwa dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang tinggi akan mendukung pengawasan manajemen yang lebih baik. Hipotesis yang dapat dibuat yakni :

H6 : Dewan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR

2.4.7 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen

Sebagaimana kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR yang dipengaruhi dewan komisaris independen maka kepemilikan pemerintah sebagai bagian dari struktur kepemilikan pada

perusahaan juga dapat dimoderasi oleh dewan komisaris independen.

Hal tersebut didasari oleh teori yang sama yakni teori agensi dimana berdasarkan teori agensi, keberadaan komisaris independen mampu menghindarkan permasalahan yang timbul serta memberikan pertimbangan yang tepat mengenai pengungkapan atau pelaporan perusahaan di dalam rapat. Dari hal tersebut, komisaris independen mampu memberikan pengaruh positif pada struktur kepemilikan di suatu perusahaan dalam hal ini adalah kepemilikan pemerintah sehingga diyakini dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR.

Dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR (Zaid et al., 2020). Hipotesis yang dapat dibuat adalah :

H7 : Dewan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR

2.4.8 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen

Likuiditas memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditasnya maka akan semakin kuat kondisi keuangannya. Menurut Sofwan, (2019) semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen maka pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif sehingga keputusan-keputusan termasuk keputusan dalam pertanggungjawaban sosial akan lebih baik karena manajemen mendapat tekanan yang lebih.

Teori stakeholder menganggap informasi keuangan dan non keuangan

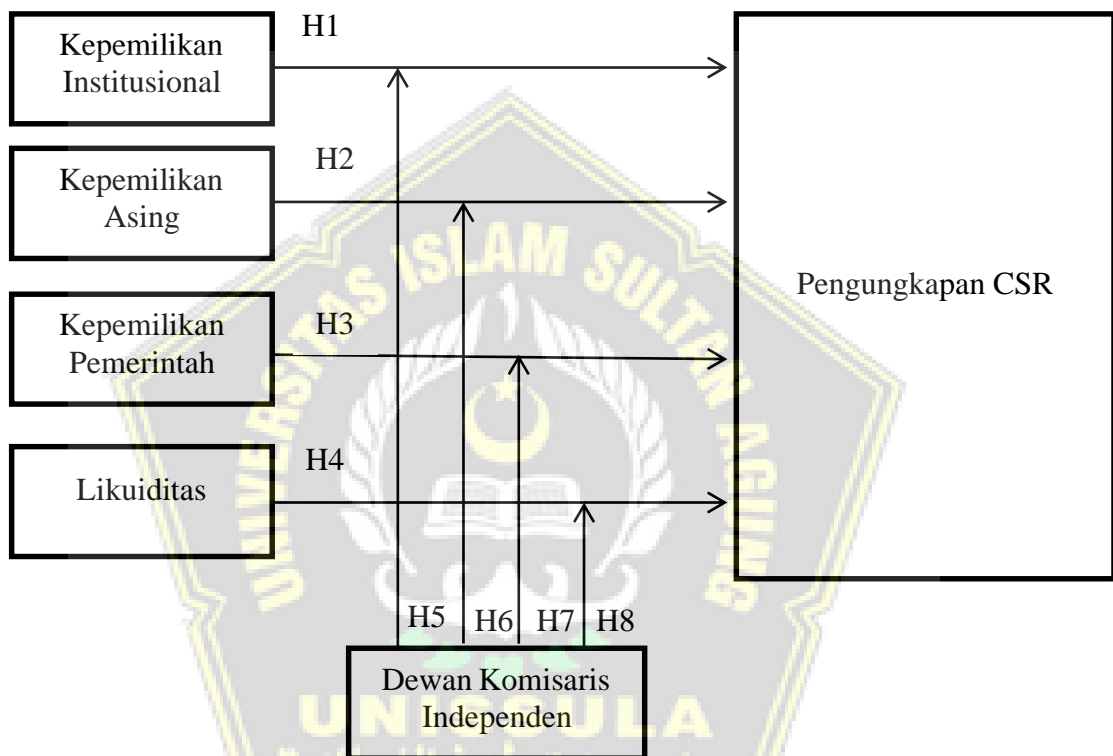
menjadi hal yang penting bagi stakeholder dan investor. Kedua informasi tersebut dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Bentuk informasi keuangan adalah rasio keuangan seperti likuiditas sedangkan informasi non keuangan adalah pelaporan CSR. Saat kondisi keuangan perusahaan baik maka menjadi pertanda perusahaan mempunyai kondisi keuangan yang sehat. Ketika mempunyai kondisi keuangan yang sehat perusahaan dapat mengalokasikan dana nya untuk melakukan dan mengungkapkan CSR nya. Maka dari itu, likuiditas menjadi acuan kondisi keuangan yang sehat yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR.

Berdasarkan teori agensi dewan komisaris independen dinyatakan menjadi salah satu pihak yang dapat mengurangi konflik keagenan. Konflik keagenan yang muncul ada berbagai macam dan salah satunya adalah terkait dengan pengungkapan CSR. Perbedaan pendapat antara principal dan manajemen terkait pengungkapan CSR ini dapat dinetralisir oleh kehadiran dewan komisaris independen. Sebagai pihak independen, dewan komisaris independen dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan positif mengenai pengungkapan CSR. Kondisi keuangan yang baik dengan ditambah dengan dorongan dari dewan komisaris independen dapat membuat pengungkapan CSR dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan likuiditas dengan pengungkapan CSR.

Penelitian Sofwan, (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan likuiditas terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesisnya adalah :

H8 : Dewan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan CSR

Berdasarkan hipotesis diatas maka kerangka penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Penelitian ini menguji suatu teori dengan menganalisis keterkaitan antar variabel yang dihipotesiskan dan akan diuji kebenarannya oleh karena itu penelitian ini berjenis kuantitatif. Penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu pengungkapan *corporate social responsibility*, variabel independen terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan likuiditas serta variabel moderasi yaitu dewan komisaris independen. Unit analisis dari penelitian ini adalah entitas perusahaan sedangkan objek analisisnya adalah pengungkapan CSR secara keseluruhan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur bidang industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan Manufaktur bidang Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI (IDX) tahun 2017-2020.
- b. Menerbitkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan.
- c. Laporan Keuangan menggunakan Rupiah.
- d. Memuat seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian berasal dari Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) dan website perusahaan tertentu. Jenis Data yang diambil merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui proses analisis yang dilakukan pada data yang sudah ada tanpa melakukan wawancara.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder pada laporan tahunan tersebut menggunakan metode dokumentasi yaitu informasi penting dari suatu Lembaga atau organisasi atau pada penelitian ini adalah perusahaan. Metode tersebut merupakan metode yang sesuai dengan sumber dan jenis data yang dibutuhkan.

3.5 Variabel dan Indikator

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh istitusi (lembaga), seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lainnya. (Rivandi, 2021)	1. Kepemilikan Institusional 2. Jumlah saham dimiliki institusional 3. jumlah saham beredar	$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$
2	Kepemilikan Asing	Kepemilikan asing adalah jumlah kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Baik	1. Kepemilikan Asing 2. Jumlah saham dimiliki pihak asing	$KA = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$

		warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing. (Patrisia & I Nym, 2019)	3. jumlah saham beredar	
3	Kepemilikan Pemerintah	Kepemilikan pemerintah merupakan Jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah. (Zaid et al., 2020)	1. Kepemilikan Pemerintah 2. Jumlah saham dimiliki pemerintah 3. jumlah saham beredar	$KP = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$
4	Likuiditas	Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya saat penagihan atau sesuai waktu jatuh tempo. (Sofwan, 2019)	1. Likuiditas dengan menggunakan rasio lancar 2. Aktiva Lancar 3. Hutang Lancar	$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$
5	Dewan Komisaris Independen	Dewan Komisaris Independen merupakan pihak luar perusahaan yang menjalankan fungsi control dari principal dan mengontrol sikap opportunistik manajermen. (Sofwan, 2019)	1. Dewan Komisaris Independen 2. Jumlah dewankomisaris independen 3. Total dewan komisaris	$DKI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$
6	Pengungkapan CSR	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> adalah pengungkapan informasi mengenai aktivitas sosial atau bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan akibat	1. CSRD = <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> 2. n= Jumlah dari indikator GRI-G4 yang diungkapkan perusahaan 3. k= Jumlah maksimal item yang harus	$CSRD = \frac{n}{k}$

aktivitas perusahaan terhadap kelompok khusus maupun masyarakat secara umum.

diungkapkan yakni sejumlah 91 item

(Kusumawati et al., 2018)

3.6 Teknik Analisis

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif adalah uji yang memberi gambaran umum mengenai variabel penelitian. Pada penelitian ini variabel penelitian meliputi Kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, likuiditas, dan pengungkapan CSR serta dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Deskripsi variabel penelitian dapat dijelaskan melalui nilai mean, median, maupun standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terkecil pada distribusi data dan nilai maksimum menunjukkan nilai terbesar dalam distribusi data.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah model pengujian bebas dari asumsi klasik sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis penelitian. Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Moderasi

Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi moderasi. Analisis regresi moderasi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan variabel independen dengan

pengaruh dari variabel moderasi. Teknik analisis tersebut sesuai dengan model penelitian ini. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi moderasi dengan persamaan statistik seperti berikut :

$$CSR (Y) = a + \beta_1.KI + \beta_2.KA + \beta_3.KP + \beta_4.L + \beta_5.DKI + e$$

$$CSR (Y) = a + \beta_1.KI + \beta_2.KA + \beta_3.KP + \beta_4.L + \beta_5.DKI + \beta_6.KI.DKI + \beta_7.KA.DKI + \beta_8.KP.DKI + \beta_9.L.DKI + e$$

Keterangan :

CSR = *Corporate Social Responsibility*

KI = Kepemilikan Institusional

KA = Kepemilikan Asing

KP = Kepemilikan Pemerintah

L = Likuiditas

DKI = Dewan Komisaris Independen

KI.DKI = Interaksi KI dan DKI

KA.DKI = Interkasi KA dan DKI

KP.DKI = Interaksi KP dan DKI

L.DKI = Interaksi L dan DKI

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = error

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Sampel

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh struktur kepemilikan dan likuiditas dengan pengungkapan CSR dengan moderasi dewan komisaris independen. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yakni laporan tahunan yang dipublikasi oleh perusahaan. Berdasarkan daftar perusahaan manufaktur di bidang industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IDX) tahun 2017-2020, maka dapat diketahui jumlah sampel penelitian sebanyak 35 perusahaan. Berikut ini adalah kriteria pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* :

Tabel 4. 1
Teknik Purposive Sampling

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur bidang Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI (IDX) tahun 2017-2020	43
2	Menerbitkan laporan keuangan dan laporan keberlanjutan	43
3	Laporan Keuangan menggunakan Rupiah	43
4	Memuat seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian	(8)
	Jumlah Perusahaan Publik yang dijadikan Sampel	35
	Jumlah Perusahaan Publik yang dijadikan Sampel tahun 2017-2020	$35 \times 4 = 140$

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif dilakukan untuk memberi gambaran umum mengenai variabel penelitian. Pada penelitian ini variabel penelitian meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, likuiditas, dan pengungkapan CSR serta dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Deskripsi variabel penelitian dapat dijelaskan melalui nilai mean, median, maupun standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan nilai terkecil pada distribusi data dan nilai maksimum menunjukkan nilai terbesar dalam distribusi data. Untuk mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian, data telah diolah menggunakan program SPSS versi 25. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini terlihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4. 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	140	0	0.998	0.78300	0.244453
Kepemilikan Asing	140	0	0.981	0.28179	0.35223
Kepemilikan Pemerintah	140	0	0.9	0.04472	0.177678
Likuiditas	140	0.152	10.252	2.66484	1.919537
Dewan Komisaris Independen	140	0.25	0.833	0.42006	0.103888
Pengungkapan CSR	140	0.165	0.637	0.40311	0.115211

Pada tabel 4.2 tersebut menjelaskan bahwa variabel independen kepemilikan

institusional memiliki nilai minimal 0,000 hingga 0,998 dengan nilai mean 0,78300 dan nilai standar deviasi 0,244453. Kepemilikan Institusional terendah ada pada PT. bumti Teknokultura Unggul di tahun 2019 dan nilai tertinggi ada pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur. Kepemilikan asing memiliki nilai minimal 0,000 hingga 0,981 dengan nilai mean 0,28179 dan nilai standar deviasi 0,352230. Nilai kepemilikan asing terendah yakni sebesar 0,000 berasal dari banyak perusahaan karena tidak semua perusahaan dimiliki oleh pihak asing seperti contohnya PT. Wilmar Cahaya Indonesia, PT. Sariguna Primatirta, dan PT. Prima Cakrawala Abadi sedangkan nilai kepemilikan asing tertinggi berasal dari kepemilikan asing pada PT. Darya-Varia Laboratoria.

Kepemilikan pemerintah memiliki nilai minimal 0,000 hingga 0,900 dengan nilai mean 0,04472 dan nilai standar deviasi 0,177678. Berdasarkan data yang diperoleh, nilai kepemilikan pemerintah tersebut berasal dari hampir keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini. Hal ini karena kepemilikan pemerintah pada perusahaan swasta di Indonesia masih rendah terlihat pada penelitian ini hanya ada pada 4 perusahaan saja yang terdapat kepemilikan pemerintah yakni PT. Delta Djakarta, PT. Ultrajaya Milk Industry, PT. Indofarma (Persero) dan PT. Kimia Farma (Persero). Nilai Likuiditas memiliki nilai minimal 0,152 hingga 10,252 dengan nilai mean 2,66484 dan nilai standar deviasi 1,919537. Dewan komisaris independen memiliki nilai minimal 0,25 hingga 0,833 dengan nilai mean 0,42006 dan nilai standar deviasi 0,103888. Pengungkapan CSR memiliki nilai minimal 0,165 hingga 0,637 dengan nilai mean 0,40311 dan nilai standar deviasi 0,115211.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik penting untuk dilakukan karena memerlukan informasi mengenai kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Uji ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh analisis regresi berganda yang baik.

4.2.1.1 Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji yang mampu memberikan hasil mengenai data yang diuji berdistribusi normal atau tidak pada variabel independen dan dependen. Regresi yang tepat adalah regresi yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan dengan Pengujian Statistik *Kolmogrov Smirnov*. Jika hasil uji *Kolmogrov Smirnov* dengan signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Hasil uji statistik uji normalitas terdapat pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000
	Std. Deviation	0.10222306
Most Extreme Differences	Absolute	0.06
	Positive	0.06
	Negative	-0.052
Test Statistic		0.06
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,200 > 0,05$ maka artinya data berdistribusi secara normal.

4.2.1.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik, korelasi antar variabel independen tidak boleh terjadi. Kriteria bebas dari multikolinieritas terletak pada *Nilai variance Inflation Factor (VIF)* dan *Nilai Tolerance* pada tabel *Coefficients* pada uji statistik. Jika $VIF < 10,00$ atau $Tolerance > 0,100$ maka model regresi bebas dari gejala mltikolinieritas. Hasil statistik uji multikolinieritas ada pada tabel 4.4 :

Tabel 4. 4
Hasil Uji Multikolinieritas

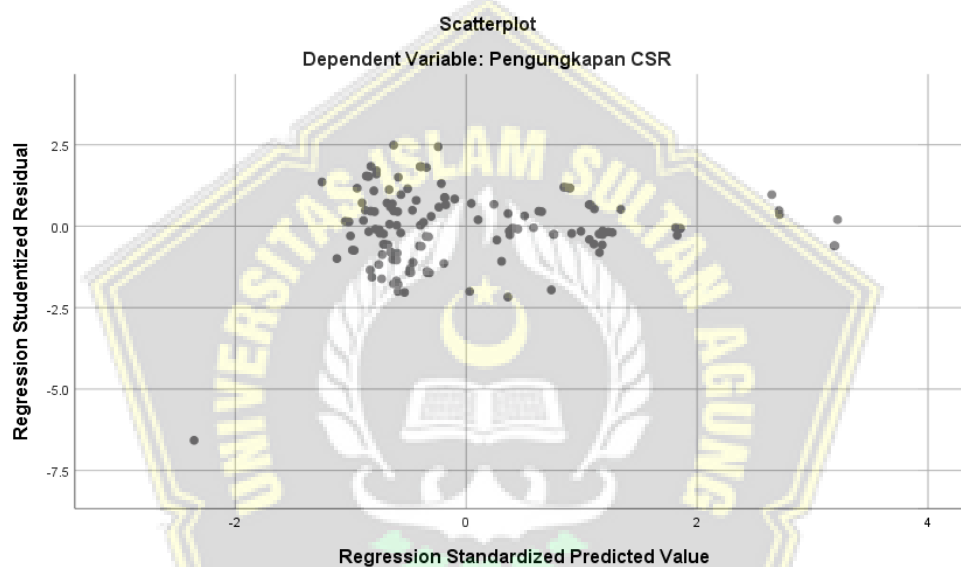
Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kepemilikan Institusional	0.948	1.054
	Kepemilikan Asing	0.978	1.023
	Kepemilikan Pemerintah	0.966	1.036
	Likuiditas	0.919	1.088
	Dewan Komisaris Independen	0.94	1.063

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil data yang telah diolah, dapat diketahui variabel yang ada dalam model memiliki *Nilai Tolerance* $> 0,100$ dan *VIF* $< 10,00$ maka artinya Tidak terjadi Gejala Multikolonieritas.

4.2.1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dalam uji regresi bertujuan untuk memastikan apakah terjadi ketidaksamaan *variance* atas satu residual pengamatan dengan pengamatan lain. Model regresi yang baik merupakan regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode *Scatterplot* dapat digunakan untuk melihat hasil uji heteroskedastisitas. Hasil statistik uji *Scatterplot* ada pada gambar berikut.



Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji statistik *Scatterplot* pada gambar di atas diperoleh bahwa titik-titik atau data berada di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja, Penyebaran titik-titik data tidak berpola, maka artinya Tidak terjadi Gejala Heteroskedastisitas.

4.2.1.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi dalam hal keterkaitan antara variabel independen. Uji statistic *runs test* dapat menunjukkan ada atau tidaknya autokorelasi. Hasil uji statistik autokorelasi

terdapat pada tabel 4.5 :

Tabel 4. 5
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-0.00802
Cases < Test Value	70
Cases >= Test Value	70
Total Cases	140
Number of Runs	61
Z	-1.696
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.09
a. Median	

Berdasarkan uji autokorelasi pada tabel di atas, menunjukkan Nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* yang diperoleh sebesar $0,090 > 0,05$ maka artinya Data Tidak Terjadi Gejala Autokorelasi karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Perhitungan *Moderated Regression Analysis (MRA)* pada struktur kepemilikan dan likuiditas pada pengungkapan CSR dengan dimoderasi oleh dewan komisaris independen melalui *SPSS* dalam proses perhitungannya dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Uji Regresi Moderasi

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.881	0.11		8.01	0.000
	Kepemilikan Institusional	-0.681	0.1	-20.95	-6.84	0.000
	Kepemilikan Asing	0.266	0.095	0.813	2.806	0.006
	Kepemilikan Pemerintah	0.216	0.462	0.333	0.467	0.641
	Likuiditas	-0.02	0.025	-0.342	-0.828	0.409
	Dewan Komisaris Independen	-1.515	0.295	-1.366	-5.128	0.000
	Kepemilikan Institusional*Dewan Komisaris Independen	2.04	0.299	20.896	6.83	0.000
	Kepemilikan Asing*Dewan Komisaris Independen	-0.475	0.221	-0.708	-2.147	0.034
	Kepemilikan Pemerintah*Dewan Komisaris Independen	0.186	1.244	0.107	0.149	0.881
	Likuiditas*Dewan Komisaris Independen	0.04	0.063	0.253	0.625	0.533

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil pada tabel di atas maka persamaan regresi moderasi sebagai berikut :

$$Y = 0,881 + -0.681 KI + 0,266 KA + 0,216 KP + -0.02 L + 1.515 DKI + 2,04 KI.DKI + -0.475 KA.DKI + 0,186 KP.DKI + 0.04 L.DKI$$

Persamaan regresi moderasi tersebut menjelaskan bahwa nilai konstanta (*constant*) 0,881 artinya bila tidak ada kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, likuiditas, dewan komisaris independen, dan interaksi variabel independen dalam penelitian ini dengan dewan komisaris independen (moderasi), maka besarnya pengungkapan CSR sebesar 0,881. Koefisien regresi KI sebesar -0.681 artinya bila kepemilikan institusional naik sebesar satu satuan akan mengurangi pengungkapan CSR sebesar 0,681 satuan dengan asumsi kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, likuiditas, dewan komisaris independen, dan interaksi variabel independen dalam penelitian ini dengan dewan komisaris independen (moderasi) konstan. Koefisien regresi KA sebesar 0,266 artinya bila kepemilikan asing naik sebesar satu satuan akan meningkatkan pengungkapan CSR sebesar 0,266 satuan dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, likuiditas, dewan komisaris independen, dan interaksi variabel independen dalam penelitian ini dengan dewan komisaris independen (moderasi) konstan. Koefisien regresi KP sebesar 0,216 artinya bila kepemilikan pemerintah naik sebesar satu satuan akan meningkatkan pengungkapan CSR sebesar 0,216 satuan dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan asing, likuiditas, dewan komisaris independen, dan

interaksi variabel independen dalam penelitian ini dengan dewan komisaris independen (moderasi) konstan. Koefisien regresi L sebesar -0.02 artinya bila likuiditas naik sebesar satu satuan maka akan mengurangi pengungkapan CSR sebesar 0.02 satuan dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dewan komisaris independen, dan interaksi variabel independen dalam penelitian ini dengan dewan komisaris independen (moderasi) konstan. Koefisien regresi DKI sebesar -1.515 artinya bila dewan komisaris independen naik sebesar satu satuan maka akan mengurangi pengungkapan CSR sebesar 1.515 satuan dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, likuiditas, dan interaksi variabel independen dalam penelitian ini dengan dewan komisaris independen (moderasi) konstan.

Koefisien regresi KI.DKI sebesar 2,04 artinya bila interaksi KI.DKI naik sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pengungkapan CSR sebesar 2,04 satuan dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, likuiditas, dewan komisaris independen, dan interaksi KA.DKI, interaksi KP.DKI serta interaksi L.DKI konstan. Koefisien regresi KA.DKI sebesar -0.475 artinya bila interaksi KA.DKI naik sebesar satu satuan maka mengurangi pengungkapan CSR sebesar 0.475 satuan dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, likuiditas, dewan komisaris independen, dan interaksi KI.DKI, interaksi KP.DKI serta interaksi L.DKI konstan. Koefisien regresi KP.DKI sebesar 0,186 artinya bila interaksi KP.DKI naik sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pengungkapan CSR sebesar 0,186 satuan dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan asing,

kepemilikan pemerintah, likuiditas, dewan komisaris independen, dan interaksi KI.DKI, interaksi, KA.DKI, serta L.DKI konstan. Koefisien regresi L.DKI sebesar 0.04 artinya bila interaksi L.DKI naik sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pengungkapan CSR sebesar 0.04 satuan dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, likuiditas, dewan komisaris independen, dan interaksi KI.DKI, interaksi KA.DKI serta interaksi KP.DKI konstan.

4.2.3.1 Hasil Uji Kelayakan Model

Uji Kelayakan model ini dapat mengungkapkan ketetapan dari fungsi regresi sampel dalam memaparkan nilai-nilai aktual. Secara statistik dengan menggunakan nilai statistik F, nilai koefisien determinasi dan nilai statistik t dapat menunjukkan kelayakan model dalam penelitian.

1. Hasil Uji F

Pengujian ini dilakukan dalam rangka mengetahui apakah struktur kepemilikan dan likuiditas secara Bersama-sama dengan dimoderasi dengan Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berikut hasil pengujian ini terdapat pada tabel 4.7 :

Tabel 4. 7
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.79	9	0.088	10.813	.000 ^b
	Residual	1.055	130	0.008		
	Total	1.845	139			

Berdasarkan tabel di atas, Nilai F hitung sebesar 10,813 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ berarti dapat diartikan struktur kepemilikan dan likuiditas secara dimoderasi dengan Dewan Komisaris Independen secara Bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

2. Koefisien Determinasi (Adjusted R-Squared)

Nilai koefisien determinasi dapat menunjukkan persentase seberapa besar variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 4.8 :

Tabel 4. 8

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 ^a	0.428	0.389	0.090091

Berdasarkan tabel diatas Nilai Adjusted R Square 0,389 berarti 38,9% variasi pengungkapan CSR dijelaskan oleh variable independen dengan moderasi, sisanya $(100\% - 38,9\%) = 61,1\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

3. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Penelitian ini menguji hipotesis pengaruh struktur kepemilikan dan likuiditas pada pengungkapan CSR dengan dimoderasi oleh dewan komisaris independen. Hasil pengujian hipotesis ada pada nilai sig di tabel 4.9 :

Tabel 4. 9
Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.881	0.11		8.01	0.000
	Kepemilikan Institusional	-0.681	0.1	-20.95	-6.84	0.000
	Kepemilikan Asing	0.266	0.095	0.813	2.806	0.006
	Kepemilikan Pemerintah	0.216	0.462	0.333	0.467	0.641
	Likuiditas	-0.02	0.025	-0.342	-0.828	0.409
	Dewan Komisaris Independen	-1.515	0.295	-1.366	-5.128	0.000
	Kepemilikan Institusional*Dewan Komisaris Independen	2.04	0.299	20.896	6.83	0.000
	Kepemilikan Asing*Dewan Komisaris Independen	-0.475	0.221	-0.708	-2.147	0.034
	Kepemilikan Pemerintah*Dewan Komisaris Independen	0.186	1.244	0.107	0.149	0.881
	Likuiditas*Dewan Komisaris Independen	0.04	0.063	0.253	0.625	0.533

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Penjelasan dari masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Hipotesis 1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Hasil pengujian hipotesis 1 : Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan CSR, diperoleh tingkat signifikansi adalah $\alpha = 0.000 < 0.05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -0.681. Hasil ini menunjukkan jumlah kepemilikan institusional yang rendah akan menunjukkan pengungkapan CSR yang tinggi, sehingga H_a ditolak dan H_o diterima, artinya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR sehingga disimpulkan bahwa H_1 ditolak

- b. Hipotesis 2 : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Hasil pengujian hipotesis 2 : Kepemilikan Asing terhadap pengungkapan CSR, diperoleh tingkat signifikansi adalah $\alpha = 0.006 < 0.05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0.266. Hasil ini menunjukkan adanya kepemilikan asing yang tinggi dalam suatu perusahaan akan meningkatkan tingkat pengungkapan CSR perusahaan tersebut. Sehingga H_a diterima dan H_o ditolak, artinya kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sehingga disimpulkan H_2 diterima.

- c. Hipotesis 3 : Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Hasil pengujian hipotesis 3 : Kepemilikan Pemerintah terhadap pengungkapan CSR, didapatkan tingkat signifikansi adalah $\alpha = 0.641$

dan koefisien regresi 0.216. Hasil ini bermakna keberadaan kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengungkapan CSR perusahaan menjadi lebih baik. Sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan sehingga disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

- d. Hipotesis 4 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

Hasil pengujian hipotesis 4 : Likuiditas terhadap pengungkapan CSR, diperoleh tingkat signifikansi adalah $\alpha = 0.409$ dan koefisien regresi sebesar -0.020. Hal ini berarti menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima yakni tingkat likuiditas perusahaan tidak menentukan tingkat pengungkapan CSR perusahaan sehingga disimpulkan bahwa H_4 ditolak.

- e. Hipotesis 5 : Dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

Hasil pengujian hipotesis 5 : Dewan Komisaris independen yang memoderasi adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR, pada interaksi 1 (Kepemilikan institusional*Dewan komisaris independen) diperoleh nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 2.040, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya saat kepemilikan institusional dimoderasi oleh Dewan komisaris independen

berpengaruh positif dan signifikan pada level 5%. Dengan kata lain, kecenderungan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR meningkat dengan adanya dorongan dari Dewan komisaris independen sehingga disimpulkan H5 diterima.

- f. Hipotesis 6 : Dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.

Hasil pengujian hipotesis 6 : Dewan komisaris independen yang memoderasi kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR, pada interaksi selanjutnya (kepemilikan asing*Dewan komisaris independen) didapat nilai signifikansi $0.034 < 0.05$ dengan nilai koefisien regresinya sebesar -0.475 , sehingga H_a ditolak dan H_o diterima, artinya dewan komisaris independen dapat memperlemah hubungan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR sehingga disimpulkan H6 ditolak.

- g. Hipotesis 7 : Dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR.

Hasil pengujian hipotesis 7 : Dewan komisaris independen yang memoderasi kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR, pada interaksi 3 (kepemilikan pemerintah*Dewan komisaris independen) diperoleh nilai signifikansi $0.881 > 0.05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0.081 . Hal ini menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima, artinya Dewan komisaris independen tidak

dapat memperkuat hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR sehingga dapat disimpulkan H7 ditolak.

- h. Hipotesis 8 : Dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan Likuiditas dengan pengungkapan CSR.

Hasil pengujian hipotesis 8 : Dewan Komisaris independen yang memoderasi likuiditas pada pengungkapan CSR, pada interaksi terakhir dari uji statistik, didapat nilai signifikansi $0.533 > 0.05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0.040. Hal ini menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya dewan komisaris independen tidak dapat memperkuat hubungan kepemilikan pemerintah pada suatu perusahaan dengan pengungkapan CSR nya sehingga dapat disimpulkan H8 ditolak.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR dengan moderasi dewan komisaris independen periode 2017 hingga 2020, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

4.3.3 Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Timbulnya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR ini dikarenakan saat kepemilikan saham perusahaan oleh institusional yang berupa Lembaga, instansi, atau perusahaan tinggi, fokus mereka terletak pada laba dari perusahaan yang akan berdampak pada return yang

diperoleh pemilik institusional tersebut dari investasi mereka di perusahaan. Maka dari itu, semakin besar kepemilikan institusional, maka tuntutan untuk memperoleh laba menjadi semakin besar pula sehingga terdorong melakukan efisiensi biaya termasuk biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas dan pengungkapan CSR perusahaan.

Hal ini berbeda dengan teori agensi dimana berdasar teori agensi pemilik saham institusional memiliki peluang untuk mengawasi sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan yang di dalamnya meliputi pengungkapan CSR. Maka semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka semakin baik pengungkapannya. Akan tetapi, berdasar penelitian ini membuktikan bahwa semakin banyak kepemilikan institusi pada perusahaan mereka lebih fokus untuk memperoleh laba dan mengurangi pengeluaran salah satunya pengeluaran untuk pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari & Rani, (2015) yang mana dijelaskan hubungan korelasi negatif terjadi antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Zaid et al., (2020), Rivandi, (2021), Edison, (2017), Patrisia & I Nym, (2019) yang mana menjelaskan bahwa hubungan korelasi positif terjadi antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Dengan kata lain, keberadaan institusi pada perusahaan dengan jumlah yang tinggi akan meningkatkan luas pengungkapan CSR perusahaan tersebut.

4.3.4 Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR

Hasil analisis terhadap hipotesis kedua menunjukkan kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan CSR, artinya semakin tinggi jumlah kepemilikan asing dari suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR nya. Hal ini karena pemilik asing berbeda dengan pemilik dalam negeri, mereka mempunyai kesadaran untuk lebih memperhatikan terhadap kasus ketenagakerjaan, pemanasan global serta pencemaran lingkungan.

Hal ini menjelaskan teori agensi bahwa kepemilikan yang tersebar pada suatu perusahaan membuat masalah keagenan antara manajemen dengan pemegang saham juga menyebar sedangkan perusahaan dengan kepemilikan yang lebih besar pada satu jenis kepemilikan dapat menyelesaikan konflik keagenan secara lebih efektif karena memiliki peluang yang lebih besar untuk ikut terlibat dalam pembahasan masalah perusahaan termasuk di dalamnya terkait pengungkapan CSR. Berdasar teori ini terbukti bahwa investor asing mampu mengawasi tindakan manajer dalam mengambil keputusan perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaid et al., (2020) yang menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR meskipun tidak signifikan.

4.3.5 Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR

Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan peran pemerintah dalam berinvestasi di perusahaan swasta di Indonesia masih tergolong rendah. Jumlah kepemilikan pemerintah pada perusahaan manufaktur swasta di Indonesia

masih sangat kecil sehingga dorongan yang seharusnya tercipta antara pemerintah dan perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR secara tepat belum bisa terwujud. Pada penelitian ini dari 35 perusahaan yang diteliti hanya ada 4 perusahaan yang terdapat kepemilikan pemerintah diantaranya yakni PT. Delta Djakarta, PT. Ultrajaya Milk Industry, PT. Indofarma (Persero) dan PT. Kimia Farma (Persero). Keempat perusahaan tersebut merupakan 2 perusahaan swasta dan 2 perusahaan milik pemerintah (persero). Persentase kepemilikan pemerintah pada kedua perusahaan swasta tersebut masih sangat kecil yakni dibawah 30%.

Hal ini tidak sejalan dengan teori agensi. Teori agensi menjelaskan terdapat interaksi antara manajemen (agen) dengan pemilik saham (principal). Pemilik saham dapat berbentuk kepemilikan pemerintah. Maka, kepemilikan pemerintah mempunyai peran interaksi dengan manajemen yang maknanya kepemilikan pemerintah mampu memperbaiki tindakan-tindakan manajer yang tidak tepat mengenai pengungkapan CSR dalam perusahaan. Namun, pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR karena dalam penelitian ini hanya ditemukan 4 perusahaan yang terdapat kepemilikan pemerintah dengan persentase kepemilikan yang rendah sehingga tidak terjadi pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zaid et al., (2020), dan Rizky & Yuyetta, (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Semakin tinggi jumlah kepemilikan pemerintah maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan

CSR nya.

4.3.6 Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR

Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil ini menunjukkan meskipun likuiditas dapat menjadi tolok ukur yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang baik dan mempunyai cukup dana untuk mengungkapkan CSR, tetapi bukan berarti dapat menjadi patokan perusahaan akan mengalokasikan dana nya untuk program maupun pengungkapan CSR.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa informasi keuangan dan non keuangan sangat dibutuhkan oleh stakeholder untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis. Kinerja keuangan dapat diukur dengan berbagai rasio salah satunya yakni likuiditas sedangkan informasi non keuangan dapat berupa laporan pengungkapan CSR. Rasio likuiditas yang tinggi pada suatu perusahaan akan menjadi penanda kondisi keuangan yang sehat bagi suatu perusahaan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan tersebut untuk mengalokasikan dana nya untuk melakukan dan mengungkapkan tanggungjawab sosialnya secara lebih mendalam. Akan tetapi, penelitian ini memberikan penjelasan bahwa saat perusahaan memiliki likuiditas yang baik dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang baik pula tetapi bukan berarti dapat menjadi patokan bahwa dana yang dimiliki perusahaan tersebut akan digunakan untuk pengungkapan CSR. Perusahaan tersebut dapat menggunakan dana mereka untuk kebutuhan lain yang menurut mereka lebih penting.

Penelitian menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR maka penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudjiyanti & Maulani, (2017), Purba & Candradewi, (2019), dan Sofwan, (2019) yang mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

4.3.7 Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen

Penelitian ini memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional mampu meningkatkan pengungkapan CSR melalui peran dewan komisaris independen. Hasil ini menunjukkan dewan komisaris independen mampu memoderasi dalam hal ini memperkuat hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Dengan kata lain, melalui penambahan peran dewan komisaris independen di antara pemilik saham institusional dengan manajemen dapat mendorong pemilik institusional dalam perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR yang baik.

Teori agensi menjelaskan perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan yang rendah atau dalam hal ini kepemilikan terfokus pada institusional akan mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemilik saham. Menurut teori agensi, dewan komisaris independen mampu menyalurkan konflik keagenan tersebut. Dewan komisaris independen dapat memberikan masukan pada saat rapat sehingga diyakini dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

(Zaid et al., 2020). Pada penelitian Zaid et al., (2020) dikatakan pula bahwa Dewan komisaris independen mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR.

4.3.8 Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen

Kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR dengan adanya moderasi dari dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen memperlemah hubungan kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa, kepemilikan asing secara parsial akan mendukung untuk membuat pengungkapan CSR dengan baik dan meskipun jumlah kepemilikan pada sebuah perusahaan rendah, keberadaan kepemilikan asing tersebut akan tetap mendorong untuk membuat pengungkapan CSR yang baik karena pemilik asing telah memiliki kesadaran akan pentingnya pengungkapan CSR. Hal ini juga dikarenakan pemilik asing memiliki kepedulian yang tinggi terkait dengan pengungkapan CSR seperti lingkungan dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil tersebut dikatakan bahwa hal ini berbeda dengan teori agensi. Menurut teori agensi kepemilikan pada perusahaan yang terfokus pada suatu jenis kepemilikan akan cenderung lebih mudah dalam menyelesaikan konflik tersebut karena mereka memiliki keinginan atau pandangan yang sama dalam pengambilan keputusan. Teori ini juga menjelaskan bahwa peran serta dewan komisaris independen sebagai pihak yang netral didalamnya mampu mengatasi masalah tersebut. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya

campur tangan dewan komisaris independen meskipun jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan tersebut rendah maka perusahaan tersebut akan tetap memiliki motivasi atau dorongan untuk membuat pengungkapan CSR yang baik dan benar karena pada dasarnya pemilik asing memiliki wawasan yang luas dan mumpuni mengenai CSR dibanding pemilik dalam negeri.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaid et al., (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR.

4.3.9 Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen

Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR. Hal ini ditunjukkan pada hasil uji statistik yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. Artinya, dewan komisaris independen tidak dapat memperkuat atau melemahkan hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR. Hal ini karena, pada penelitian ini kepemilikan pemerintah sendiri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang disebabkan masih sedikitnya kepemilikan atau investasi pemerintah terhadap perusahaan swasta di Indonesia sehingga pemberian peran dari dewan komisaris independen tidak cukup untuk mendorong pengungkapan CSR.

Penelitian ini memberi penjelasan bahwa dorongan dari dewan komisaris independen saja pada pemilik pemerintah tidak cukup untuk meningkatkan pengungkapan CSR di Indonesia. Hal ini berbeda dengan teori agensi yang

menjadi dasar hubungan antara principal dengan manajemen. Pihak principal dalam hal ini kepemilikan pemerintah memberikan kewenangan kepada manajemen untuk melakukan kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Maka, seluruh kegiatan perusahaan hingga pelaporannya berdasarkan keputusan manajemen dengan pengawasan dari pemilik saham perusahaan sehingga dalam hal ini kepemilikan pemerintah bersama dengan dewan komisaris independen memiliki peluang untuk mendorong pengungkapan CSR. Meskipun begitu, pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah pada perusahaan swasta di Indonesia masih sangat rendah sehingga dorongan dari dewan komisaris independen tersebut tidak cukup kuat untuk dapat memberi pengaruh terhadap hubungan kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Zaid et al., (2020) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris independen mampu memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR.

4.3.10 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan Komisaris Independen

Penelitian menunjukkan hasil likuiditas terhadap pengungkapan CSR tidak dapat dimoderasi oleh dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan likuiditas dengan pengungkapan CSR. Hal ini karena, dewan komisaris independen hanya mampu mendorong perusahaan atau manajemen ketika kondisi keuangan perusahaan baik, akan tetapi pada praktiknya kegiatan atau keputusan bisnis berada di tangan manajemen.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori stakeholder dimana dijelaskan terdapat informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder yaitu informasi keuangan dan non keuangan. Informasi tersebut dibutuhkan oleh stakeholder untuk membuat keputusan bisnis serta investor untuk mengambil keputusan investasi. Ketika kinerja keuangan perusahaan baik maka perusahaan dapat mengalokasikan dana nya untuk pengungkapan CSR. Selain itu, berdasarkan teori agensi dewan komisaris independen mampu menimalisir konflik-konflik serta memberikan masukan yang tepat mengenai pengungkapan atau pelaporan perusahaan di dalam rapat. Akan tetapi, melalui penelitian ini diketahui bahwa likuiditas saja tidak dapat menjadi tolok ukur alokasi dana perusahaan untuk pengungkapan CSR serta dengan peranan dari dewan komisaris independen saja tidak cukup karena dewan komisaris independen hanya mempunyai fungsi pengawasan sedangkan untuk pengambilan keputusan ada di tangan pemilik saham dan manajemen.

Hasil Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sofwan, (2019) dimana dewan komisaris independen mampu memberi pengaruh signifikan antara likuiditas dengan pengungkapan CSR.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dari 35 perusahaan manufaktur bidang industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun (periode 2017-2020), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini karena semakin besar jumlah kepemilikan institusi atau Lembaga pada suatu entitas maka akan mendorong perusahaan untuk memperoleh laba yang besar sehingga akan mengefisiensi biaya-biaya termasuk biaya pengungkapan CSR.
2. Kepemilikan Asing terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, yang berarti semakin tinggi peranan atau jumlah kepemilikan pihak asing pada suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan seluruh aktivitas perusahaan tersebut menjadi optimal salah satunya yakni pengungkapan CSR. Seiring berkembangnya zaman pihak asing tidak hanya terfokus pada laba atau pendapatan perusahaan tetapi aspek lain yang mampu menarik pihak di luar perusahaan yang saat ini gencar dicanangkan yaitu pengungkapan CSR.
3. Kepemilikan Pemerintah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi, Kepemilikan pemerintah tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan masih rendahnya pengambilan posisi atau peranan pemerintah pada perusahaan swasta. Semestinya dengan kepemilikan pemerintah dapat mendorong pengungkapan CSR di tiap perusahaan.

4. Likuiditas tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi, Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini berarti meskipun likuiditas dapat menjadi tolok ukur yang menyatakan bahwa kondisi keuangan suatu perusahaan adalah baik dan mempunyai cukup dana untuk pengungkapan CSR tetapi bukan berarti dapat menjadi patokan perusahaan akan mengalokasikan dananya untuk program maupun pengungkapan CSR.
5. Dewan komisaris independen terbukti memperkuat hubungan kepemilikan institusional pada pengungkapan CSR. Dengan demikian, peran dewan komisaris independen dalam mengurangi konflik keagenan berdasar dari teori agensi dapat mendorong kepemilikan institusional untuk membuat pengungkapan CSR secara benar.
6. Dewan komisaris independen tidak terbukti memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Melainkan dewan komisaris independen memperlemah hubungan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan, meskipun jumlah kepemilikan asing rendah tetap mendorong untuk membuat pengungkapan CSR yang baik pada sebuah perusahaan karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi terkait isu-isu *environmental*, HAM, maupun

ketenagakerjaan yang merupakan komponen dari *Corporate Social Responsibility*.

7. Dewan komisaris independen tidak terbukti memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR. Dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR. Hal ini karena, pada penelitian ini kepemilikan pemerintah sendiri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang disebabkan masih sedikitnya kepemilikan atau investasi pemerintah terhadap perusahaan swasta di Indonesia sehingga pemberian peran dari dewan komisaris independen tidak cukup untuk mendorong pengungkapan CSR.
8. Dewan komisaris independen tidak terbukti memperkuat hubungan likuiditas terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini memberi hasil bahwa dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan likuiditas terhadap pengungkapan CSR. Hal ini karena meski likuiditas suatu perusahaan baik masih ada faktor lain di luar likuiditas yang membuat perusahaan mengalokasikan dananya untuk pengeluaran lain yang lebih penting menurut mereka dibanding pengungkapan CSR.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa point yang bisa dipertimbangkan dengan pihak terkait, yaitu :

5.2.1 Implikasi Teoritis

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai struktur kepemilikan dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR dengan moderasi Dewan komisaris independen dengan sampel terkini yakni perusahaan manufaktur bidang industri barang konsumsi tahun 2017-2020. Melalui hasil ini dapat diketahui apakah likuiditas dan struktur kepemilikan jenis apa saja yang mampu memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR serta keberadaan Dewan komisaris independen di dalam perusahaan sehubungan dengan hal tersebut.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kembali mengenai fenomena yang ada dalam dunia ekonomi khususnya perusahaan pada terkait pengungkapan CSR sehingga dihasilkan penelitian yang lebih baik.

5.2.2 Implikasi Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara lebih luas terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial sebuah perusahaan. Melalui penelitian ini juga peneliti dapat mengimplelmentasikan ilmu yang telah didapat pada perkuliahan dengan berfikir kritis dan sistematis dalam menganalisa fenomena yang ada pada perusahaan berkaitan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dan faktor-faktornya
- b. Bagi Perusahaan Manufaktur, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pertimbangan mengenai bagaimana upaya maupun pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan CSR melalui

optimalisasi struktur kepemilikan, likuiditas, dan Dewan komisaris independen.

- c. Bagi Investor, melalui hasil penelitian ini investor dapat melihat peran mereka secara lebih dalam mengenai pengungkapan CSR karena porsi kepemilikan di perusahaan mempengaruhi bagaimana kemampuan pengungkapan CSR.
- d. Bagi Pemerintah, penelitian ini sebagai pemicu bagi pemerintah bahwa peran kepemilikan atau investasi pemerintah terhadap perusahaan di Indonesia menjadi penting terkait dengan pengungkapan CSR. Seiring perkembangan zaman banyak perusahaan yang memperhatikan CSR nya karena masyarakat lebih tertarik dengan perusahaan yang tidak hanya fokus pada laba tetapi melakukan pertanggungjawaban sosial yang baik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka keterbatasan pada penelitian ini adalah rendahnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yakni masih dibawah 50% (sebesar 38,9%).

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, untuk penelitian mendatang diarahkan untuk menambahkan variabel independen seperti kinerja keuangan lainnya serta menambah jumlah sampel agar dapat diperoleh sampel yang cukup sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison, A. (2017). Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Bisma*, 11(2), 164. <https://doi.org/10.19184/Bisma.V11i2.6311>
- Kusumawati, R. R., Fidziah, & Rosniyati, A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi STIE*, 14(1). https://www.researchgate.net/publication/343530343_Pengaruh_Kepemilikan_Institusional_Dan_Kepemilikan_Asing_Terdapat_Pengungkapan_Corporate_Social_Responsibility_Pada_Perusahaan_Lq45_Yang_Terdaftar_Di_Bursa_Efek_Indonesia
- Mudjiyanti, R., & Maulani, S. S. (2017). Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Ddan Bisnis MEDIA EKONOMI*, XVII, 53182. <https://www.neliti.com/publications/163488/Pengaruh-Likuiditas-Dan-Profitabilitas-Terdapat-Pengungkapan-Corporate-Social-Res>
- Patrisia, A. S., & I Nym, W. A. P. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 468. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V29.I01.P30>
- Purba, I. A. P. L., & Candradewi, M. R. (2019). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(9), 5372.
- Rivandi, M. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.25105/Jipak.V16i1.6439>
- Rizky, Z., & Yuyetta, E. N. A. (2015). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Pemerintah, Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Pemerintah, Daya Saing Industri, Serta Profitabilitas Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Journal Undip*, 4, 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/Accounting>
- Sari, W. N., & Rani, P. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Return On Assets(Roa) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility(Csr) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *Akuntansi Dan Keunagan*, 3(2), 124–133.
- Sofwan, M. U. (2019). Efek Moderasi Dewan Komisaris Antara Manajemen Laba Riil, Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(2), 147.

<https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5017>

Zaid, M. A. A., Abuhijleh, S. T. F., & Pucheta-Martínez, M. C. (2020). Ownership Structure, Stakeholder Engagement, And Corporate Social Responsibility Policies: The Moderating Effect Of Board Independence. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 27(3), 1344–1360. <https://doi.org/10.1002/csr.1888>

